

ANALISIS DINAMIKA EKONOMI JAPAN MENGGUNAKAN STATE-LED DEVELOPMENT THEORY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI ASIA TIMUR: STUDI KASUS ARTIKEL BERITA ONLINE JANUARI 2022- JUNI 2024

Chika Raka Siwi¹, Deny Furniyawan Samuel², Nova Putri Maharani³, Nurhayati⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: chikarakasiwi1@gmail.com; samueldeny.untagikt@gmail.com;
nvaptrmhrn1@gmail.com; nurhyatti@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini menganalisis dinamika ekonomi Jepang pada periode Januari 2022–Juni 2024 melalui pendekatan state-led development theory untuk memahami bagaimana negara mempertahankan peran sentral dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Penelitian ini menggunakan analisis konten terhadap artikel berita daring guna mengidentifikasi strategi pemerintah Jepang dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui kebijakan moneter ultra-longgar, penguatan sektor industri strategis, dan langkah-langkah economic security. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun Jepang menghadapi tekanan berupa pelemahan yen, inflasi impor, dan risiko distorsi pasar akibat intervensi Bank of Japan, negara tetap memprioritaskan intervensi aktif demi mempertahankan daya saing industri dan stabilitas makroekonomi. Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan kebijakan moneter Jepang berdampak signifikan pada dinamika ekonomi-politik Asia Timur, termasuk fluktuasi nilai tukar regional, aliran modal, dan kompetisi kebijakan antara Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Secara keseluruhan, hasil studi menegaskan bahwa model state-led development tetap relevan namun membutuhkan adaptasi terhadap tantangan ekonomi modern.

Kata Kunci: Jepang, State-led development, Asia Timur, dinamika ekonomi politik

ABSTRACT

This study analyzes Japan's economic dynamics between January 2022 and June 2024 using the state-led development framework to examine how the government continues to play a central role amid global economic pressures. Through content analysis of online news articles, the research identifies Japan's key strategies, including ultra-loose monetary policy,

industrial policy adjustments, and economic security initiatives aimed at strengthening strategic sectors and stabilizing domestic markets. The findings indicate that while Japan faces persistent challenges—such as yen depreciation, import-driven inflation, market distortions linked to Bank of Japan interventions, and demographic decline—the state remains highly interventionist to preserve industrial competitiveness and macroeconomic stability. The study further highlights the regional implications of Japan's policies, showing their influence on capital flows, currency movements, and strategic responses by neighboring East Asian economies, particularly China and South Korea. Overall, the results demonstrate that Japan's state-led development model remains relevant, though it requires greater flexibility and structural adaptation to effectively address the complexities of contemporary global and regional economic conditions.

Keywords: *Japan, State-led development, East Asia, political economy dynamics*

Pendahuluan

Jepang merupakan salah satu negara Asia Timur yang memiliki perjalanan pembangunan ekonomi yang sangat khas dan sering dijadikan contoh paling awal dari sistem state-led development di kawasan tersebut. Sebagai negara “non-Eropa” yang tidak mengalami kolonialisme Barat secara langsung, Jepang mampu membangun kerangka ekonomi modern tanpa menimbulkan ketergantungan struktural terhadap Barat. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa model pembangunan Jepang sering digunakan sebagai rujukan dalam studi ekonomi politik Asia Timur (Vogel, 1979; Johnson, 1982). Keberhasilan Jepang menunjukkan bagaimana sebuah negara dapat mengadopsi kapitalisme terkelola (*managed capitalism*) yang berpijak pada intervensi negara yang kuat, sekaligus tetap mempertahankan dinamika pasar yang kompetitif. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini akan menguraikan perkembangan sejarah ekonomi Jepang, dinamika sistem ekonominya, serta kebijakan luar negeri yang terkait dengan transformasi ekonomi negara tersebut.

Dalam konteks regional, Jepang memainkan peran strategis dalam ekonomi Asia Timur dan Asia Pasifik. Sejak 1970-an, Jepang menjadi sumber investasi asing langsung (FDI) terbesar di kawasan dan pendorong utama integrasi ekonomi regional melalui investasi di sektor manufaktur, elektronik, otomotif, hingga infrastruktur (Hatch &

Yamamura, 2012). Peran penting Jepang juga terlihat dalam institusi regional seperti ASEAN+3, RCEP, dan kerangka Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), yang memperkuat posisinya sebagai aktor ekonomi dan politik utama di Asia Timur. Selain itu, Jepang berkontribusi besar pada rantai pasok global dalam teknologi canggih, termasuk robotik, semikonduktor, energi hidrogen, dan kendaraan hibrida—sektor-sektor yang sangat menentukan arah kompetisi teknologi di kawasan (OECD, 2023).

Dalam literatur *developmental state*, model Jepang merupakan fondasi analitis yang dikembangkan oleh Chalmers Johnson dalam karyanya *MITI and the Japanese Miracle* (1982). Johnson menekankan bahwa keberhasilan Jepang didorong oleh birokrasi teknokrat berkapasitas tinggi, terutama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Internasional (MITI), yang berperan mengarahkan alokasi sumber daya, memilih industri prioritas, serta mengkoordinasikan hubungan antara negara dan perusahaan besar. Model ini kemudian dikenal sebagai *plan-rational developmental state*, di mana negara bertindak sebagai perencana yang aktif, bukan sekadar regulator.

Transformasi ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II merupakan salah satu kisah pemulihan ekonomi paling signifikan dalam sejarah modern. Setelah mengalami kehancuran fisik dan keuangan, Jepang melakukan reformasi besar-besaran yang mencakup restrukturisasi industri, reformasi agraria, stabilisasi moneter, hingga perluasan ekspor. Pada era 1950–1970-an, Jepang memasuki high-growth era, dengan laju pertumbuhan rata-rata GDP di atas 10% per tahun (Hayami, Saitô, and Toby, 2004). Strategi pembangunan berorientasi ekspor, inovasi teknologi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadikan Jepang negara ekonomi maju dan pemimpin industri global dalam waktu relatif singkat. Keberhasilan ini kemudian menjadi rujukan bagi Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura dalam membangun model negara pembangunan mereka masing-masing.

Namun, memasuki dekade 1990-an, Jepang menghadapi tantangan berat akibat pecahnya gelembung aset. Krisis tersebut memicu stagnasi panjang selama lebih dari satu dekade, yang kemudian dikenal sebagai *the Lost Decade*. Meskipun demikian, respons negara melalui stimulus fiskal besar-besaran, penyehatan bank, serta reformasi struktural menunjukkan bahwa intervensi pemerintah tetap menjadi instrumen utama

dalam menjaga stabilitas ekonomi (Hoshi & Kashyap, 2004). Pada 2013, program Abenomics yang dicetuskan oleh Shinzo Abe mencoba menghidupkan kembali perekonomian Jepang melalui kombinasi tiga kebijakan: monetary easing, fiscal expansion, dan structural reforms (Hausman & Wieland, 2014).

Dalam konteks kontemporer, khususnya pada periode 2022 hingga 2024, perekonomian Jepang kembali menghadapi tekanan global akibat pandemi COVID-19, gangguan rantai pasok, inflasi energi, serta ketegangan geopolitik Asia Timur. Laporan IMF (2023) dan OECD (2023) menunjukkan bahwa Jepang berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan harga, stimulus fiskal, investasi teknologi strategis, serta program economic security untuk memperkuat otonomi industri. Selain itu, Jepang semakin aktif dalam kebijakan luar negeri ekonomi, terutama sebagai respons terhadap persaingan teknologi AS-Tiongkok, yang mempengaruhi kebijakan industri semikonduktor dan energi bersih.

Studi ini berusaha untuk menjawab pertanyaan terkait apa yang dimaksud dengan *State-Led Development*, bagaimana penerapannya di Jepang, dan tantangan yang dihadapi sejak tahun 1980-an. Selain itu, strategi dan kebijakan pemerintah Jepang apa serta isu-isu dominan yang muncul akibat kebijakan tersebut dan respon pasar terhadap kebijakan tersebut. Terakhir, studi ini juga akan menjawab bagaimana pengaruh kebijakan *State-Led Development* yang diambil oleh pemerintah Jepang terhadap dinamika ekonomi politik di kawasan Asia Timur, serta tantangan terkini yang dihadapi Jepang, termasuk isu demografi dan utang publik.

Kerangka Teoritis

Developmental state adalah suatu paradigma yang mempengaruhi arah dan kecepatan pembangunan ekonomi dengan secara langsung mengintervensi proses pembangunan yang berbanding terbalik dengan cara berpikir yang mengandalkan kekuatan pasar dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Paradigma ini membangun tujuan substantif sosial dan ekonomi yang memandu proses pembangunan dan mobilisasi sosial. Karakteristik dari paradigma ini adalah negara yang kuat, peran dominan pemerintah, rasionalitas teknokratik dalam pembuatan kebijakan ekonomi, birokrasi

yang otonom dan kompeten serta terlepas dari pengaruh kepentingan politik. Secara detail dalam Johnson's formulation (Pei-Shan Lee, 2002), bahwa yang dimaksud dengan *developmental state* adalah kebijakan negara yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan produksi (sebaliknya dari konsumsi dan distribusi) sebagai tujuan fundamental dari kegiatan negara. Selain itu, negara juga merekrut aparat birokrasi ekonomi yang bertalenta tinggi, kohesif dan disiplin dengan basis merit. Dalam kasus Jepang, pemerintah mengkonsentrasikan talenta birokrasi ke dalam lembaga sentral (seperti MITI di Jepang) yang bertanggung jawab atas tugas transformasi industrial. Adanya pelembagaan hubungan antar birokrasi dengan elit bisnis dalam rangka pertukaran informasi dan mendorong kerja sama dalam keputusan-keputusan penting berdasarkan pembuatan kebijakan yang efektif. Hal ini dilakukan guna melindungi jaringan pengambil kebijakan dari tekanan kepentingan dan tuntutan lainnya. Dengan mengimplementasikan kebijakan pembangunan dengan kombinasi jaringan kerja pemerintah dengan dunia industrial dan kontrol publik atas sumber daya sumber daya, seperti keuangan, *developmental state* menaruh peranan dominan pada lembaga eksekutif.

Kinerja ekonomi dibangun melalui penataan kelembagaan yang kuat yang dilakukan oleh pemerintah. Ini biasa dikenal dengan proses pembangunan ekonomi terencana. Pemerintah menyelenggarakan ekonomi terencana ini melalui lembaga yang ditunjuk khusus yang bertanggung jawab atas tugas mengarahkan pembangunan itu sendiri, dan menjalankan beragam alat kebijakan untuk memastikan kegiatan bisnis tetap terpelihara dan terkelola dalam kerangka kepentingan nasional. Hal ini dianggap sebagai prasyarat penting dalam mengelola proses pembangunan.

Namun demikian dalam menjalankan konsep *developmental state*, adalah penting untuk memiliki birokrasi yang bertanggung jawab dan kompeten. Dalam hubungan ini Moon (2002) menjelaskan bahwa organisasi harus terdiri atas individu-individu yang sangat mampu (*capable*) yang direkrut melalui persaingan yang terbuka. Mereka ini memiliki kemampuan analitik dan kompetensi teknis. Ini adalah sebuah keharusan, karena apabila tidak terpenuhi maka paradigma ini tidak akan dapat membangun ekonomi dengan arah yang benar. Beeson (2002) menjelaskan bahwa kunci untuk

menjalankan *development state* yang efektif adalah kapasitas negara (*state capacity*), yaitu kemampuan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan. Selain birokrasi yang kompeten juga diperlukan hubungan yang efektif dengan dunia usaha sebagai titik dalam inisiatif-inisiatif pembangunan yang berhasil.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Penerapan *State-led development* di Jepang

Penerapan konsep *development state* di Jepang diperkenalkan oleh Chalmers Johnson dalam bukunya *MITI and The Japanese Miracle : The Growth Industrial Policy 1925-1975*. Negara sebagai aktor utama. MITI (Ministry of International Trade and Industry) dan Menteri Keuangan mempunyai kapasitas untuk mengendalikan tabungan domestik (*domestic savings*) untuk menyediakan kredit murah bagi industri-industri tertentu. Melalui cara ini, perencana Jepang mampu memandu proses industrialisasi sejak dini, dan juga mendorong lebih banyak industri yang bernilai tinggi, sedangkan industri yang sudah tua dipindahkan ke negara lain. Pemerintah memberi insentif kepada masyarakat bisnis melalui peraturan administratif, subsidi, proteksi hingga peninjauan pasar.

Jepang merupakan salah satu negara yang dianggap paling sukses dalam membangun perekonomiannya. Hal ini terbukti dari perjalanan panjang sejarah pembangunan ekonomi Jepang yang terbagi menjadi dua bagian yakni: pada abad kesembilan-belas (zaman restorasi meiji sebagai industrialisasi awal Jepang) sampai awal Perang Dunia Kedua, serta dari masa 'pertumbuhan cepat' (pasca Perang Dunia Kedua, 1950-an) sampai saat ini. Itu semua tentunya dapat menjadi bukti untuk memperkuat posisi Jepang sebagai negara yang mampu untuk memajukan perekonomiannya, terutama untuk masa setelah PD II, dimana keadaan ekonomi Jepang dapat berubah secara drastis, dari negara yang miskin menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar di dunia, khususnya di wilayah Asia.

Kemajuan ekonomi Jepang itu sendiri pada dasarnya tidak muncul begitu saja, melainkan melalui pengimplementasian sejumlah kebijakan ekonomi yang dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Jepang atau bahkan mempertahankan tingkat

pertumbuhan ekonominya tersebut melalui peningkatan proses produksi yang ada, serta peningkatan dalam hal volume ekspor komoditasnya. Salah satu kebijakannya ialah dengan cara penyaluran bantuan luar negeri Jepang atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Official Development Assistance* (ODA), kebijakan lainnya ialah kebijakan penyaluran investasi Jepang ke sejumlah wilayah regional. Baik kebijakan ODA maupun kebijakan investasi luar negeri (atau yang biasa dikenal dengan Foreign Direct Investment), pada dasarnya merupakan dua buah kebijakan yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, dimana investasi (yang kemudian melalui perdagangan) sebagai salah satu sumber penerimaan Jepang, yang otomatis pula menjadi salah satu sumber pendanaan bagi keberlangsungan ODA, serta peran ODA sebagai pendukung dan pelancar investasi Jepang (FDI) di sejumlah negara, yang tentunya keduanya merupakan stimulus bagi ekonomi Jepang. Bantuan luar negeri memungkinkan pemerintah negara donor untuk intervensi dalam perekonomian negara penerima, selain itu pula bantuan luar negeri dapat menunjang peningkatan investasi asing di negara berkembang.

Dalam kurun waktu tiga puluh tahun sejak berakhirnya Perang Dunia II, Jepang, di bawah pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat, tidak mengalami krisis yang mengancam keamanannya secara langsung. Dalam hal ekonomi, Jepang telah mengabdikan kekuatan nasionalnya untuk membangun ekonomi dan mencapai pembangunan ekonomi dan stabilitas sosialnya saat ini, dengan dukungan dari kerangka besar sistem GATT-IMF serta ekonomi Amerika Serikat yang kuat yang menopang sistem ini. Namun, berbagai kondisi telah banyak berubah akibat perkembangan pada tahun 1970-an.

Pada era 1980-an terjadinya beberapa perubahan dalam ekonomi dunia, terutama dalam ekonomi negara-negara industri, seperti pembangunan ekonomi Jepang yang pesat. Hal ini dapat ditunjukkan, oleh fakta bahwa Gross National Product (GNP) Jepang dan Jerman, yang pada tahun 1960 masing-masing sebesar 9% dan 14% dari GNP Amerika Serikat, meningkat menjadi 43% dan 32% pada tahun 1979. Ekonomi dunia telah mengalami perubahan struktural yang besar sejak masa "kejutan dolar" pada tahun 1971 dan krisis minyak pada tahun 1973. Dunia saat itu menghadapi berbagai masalah

sulit seperti pertumbuhan ekonomi yang rendah, inflasi, proteksionisme, ketidastabilan perdamaian dunia, energi, serta keuangan dan mata uang internasional.

Dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang positif dalam situasi internasional yang berubah cepat sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab, Jepang harus siap untuk membuat pilihan yang sulit dan, terkadang, bahkan berkorban. Sikap seperti itu harus didukung oleh keyakinan kuat bahwa Jepang harus mempertahankan nilai-nilai dasarnya, yaitu kebebasan dan demokrasi. Dalam hal ini, Jepang perlu lebih memperkuat solidaritas dan kerja sama dengan negara-negara bebas seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.

Tujuan utama kebijakan luar negeri Jepang adalah untuk membantu mengatasi berbagai kesulitan ekonomi dunia seperti inflasi, pengangguran, dan masalah energi, serta bekerja sama dalam mencapai pembangunan ekonomi dunia yang stabil dan berkelanjutan sebagai anggota utama manajemen ekonomi dunia. Untuk tujuan ini, semakin penting untuk memperkuat kerja sama internasional dan mengambil, tidak hanya langkah-langkah manajemen permintaan jangka pendek, tetapi juga langkah-langkah penyesuaian struktural jangka menengah dan panjang di sisi penawaran, seperti peningkatan produktivitas dan inovasi teknis, sambil membuat dinamisme ekonomi pasar berjalan. Mengenai perdagangan, Jepang perlu melakukan upaya baru untuk menghindari proteksionisme dan mengembangkan perdagangan bebas berdasarkan Putaran Perundingan Perdagangan Multilateral Tokyo, sambil lebih membuka pasarnya dan menginternasionalkan layanan domestiknya. Dalam hubungan ini, Jepang harus membantu negara-negara yang baru melakukan industrialisasi untuk memainkan peran yang tepat dalam perdagangan dunia.

Strategi dan Kebijakan Pemerintah Jepang

1. Kebijakan Moneter Ultra-Longgar

Kebijakan moneter ultra-longgar yang diterapkan oleh Bank of Japan (BoJ) adalah salah satu pendekatan paling ekstensif dan kontroversial di antara bank-bank sentral utama dunia. Strategi ini dirancang untuk mengatasi tantangan ekonomi yang mendalam,

termasuk rendahnya pertumbuhan ekonomi dan deflasi yang berkepanjangan.

1.1 Yield Curve Control (YCC)

Pada September 2016, BoJ memperkenalkan kebijakan Yield Curve Control (YCC) sebagai langkah untuk melengkapi kebijakan moneter ultra-longgar mereka. Melalui YCC, BoJ menetapkan target imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB) jangka panjang. Target utama adalah mempertahankan imbal hasil JGB 10 tahun di sekitar 0%. Untuk mencapai target YCC, BoJ melakukan operasi pasar terbuka, yaitu membeli dan menjual JGB dalam jumlah besar. Data terbaru menunjukkan bahwa BoJ kini memegang sekitar 45% dari total JGB yang beredar, mencerminkan skala besar dari intervensi mereka di pasar obligasi. Selain itu, BoJ juga membeli aset lainnya seperti obligasi korporasi dan saham yang diperdagangkan di bursa (ETF).

Tujuan dari YCC adalah untuk menjaga suku bunga jangka panjang tetap rendah dan stabil, yang diharapkan dapat mendukung investasi dan konsumsi domestik. Sejak penerapan YCC, suku bunga hipotek di Jepang telah tetap rendah, yang membantu meningkatkan aktivitas di sektor perumahan. Misalnya, data menunjukkan bahwa sejak 2016, penjualan rumah baru di Jepang telah meningkat rata-rata 1,5% per tahun.

1.2 Suku Bunga Negatif

Pada Januari 2016, BoJ menetapkan suku bunga negatif sebesar -0,1% untuk sebagian dari cadangan yang disimpan oleh bank komersial di BoJ. Langkah ini bertujuan untuk mendorong bank-bank komersial untuk menyalurkan lebih banyak kredit kepada sektor riil, dengan harapan dapat meningkatkan investasi dan konsumsi. Penerapan suku bunga negatif telah berkontribusi pada peningkatan kredit kepada sektor swasta. Data menunjukkan bahwa pinjaman bank komersial telah meningkat rata-rata 2,5% per tahun sejak 2016, dibandingkan dengan rata-rata 0,8% per tahun sebelum suku bunga negatif diterapkan. Ini mencerminkan keberhasilan kebijakan ini dalam meningkatkan likuiditas di pasar.

Meskipun kebijakan suku bunga negatif bertujuan untuk meningkatkan inflasi, hasilnya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Target inflasi BoJ sebesar 2% belum tercapai, dengan inflasi pada 2023 masih berada di sekitar 1%. Tantangan utama yang dihadapi adalah ekspektasi inflasi yang tetap rendah di kalangan konsumen dan

perusahaan.

2. Penyesuaian Kebijakan YCC

BoJ telah menunjukkan fleksibilitas dalam kebijakan YCC dengan melakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi pasar. Pada Juli 2018, BoJ memperluas kisaran target imbal hasil JGB 10 tahun dari $\pm 0,1\%$ menjadi $\pm 0,2\%$. Penyesuaian ini memungkinkan lebih banyak variasi dalam imbal hasil tanpa mengubah target utama, memberikan BoJ lebih banyak ruang untuk bertindak dalam menghadapi fluktuasi pasar. Pandemi COVID-19 membawa ketidakpastian ekonomi yang besar, yang memaksa BoJ untuk menyesuaikan kebijakan mereka lebih lanjut. BoJ meningkatkan pembelian JGB dan surat berharga perusahaan untuk mendukung likuiditas pasar selama periode ini. Selain itu, mereka memperkenalkan langkah-langkah tambahan untuk mendukung sektor keuangan dan memastikan stabilitas ekonomi.

3. Peningkatan Pembelian Obligasi

BoJ telah memperluas program pembelian obligasi secara signifikan sejak krisis keuangan global 2008. Pada 2023, BoJ memegang lebih dari 530 triliun yen dalam JGB, yang merupakan sekitar 45% dari total utang pemerintah Jepang. Ini mencerminkan komitmen BoJ untuk mendukung ekonomi melalui intervensi pasar obligasi yang besar. Pembelian obligasi oleh BoJ telah berhasil menjaga imbal hasil JGB tetap rendah dan stabil, mengurangi biaya pinjaman pemerintah dan membantu stabilitas pasar keuangan. Volatilitas imbal hasil JGB menurun signifikan sejak penerapan kebijakan ini, yang membantu menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil.

4. Pendekatan yang Lebih Fleksibel

Selama pandemi COVID-19, BoJ memperkenalkan program pinjaman khusus untuk mendukung usaha kecil dan menengah yang terdampak. Hingga akhir 2023, lebih dari 50 triliun yen telah disalurkan melalui program ini, membantu banyak bisnis untuk bertahan selama masa sulit ini. BoJ bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk mengoordinasikan kebijakan fiskal dan moneter. Langkah ini termasuk mendukung

program stimulus fiskal pemerintah dengan menjaga suku bunga rendah dan membeli obligasi pemerintah. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas langkah-langkah stimulus dan memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang. Kebijakan moneter ultra-longgar yang diterapkan oleh BoJ mencakup berbagai langkah strategis untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi deflasi. Melalui YCC, suku bunga negatif, peningkatan pembelian obligasi, dan pendekatan fleksibel, BoJ berusaha menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan. Data menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil menjaga suku bunga rendah dan meningkatkan likuiditas, meskipun tantangan seperti mencapai target inflasi tetap ada. Upaya berkelanjutan BoJ untuk menyesuaikan kebijakan sesuai kondisi ekonomi menunjukkan komitmen mereka terhadap stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang Jepang.

Isu Dominan yang Muncul

Kebijakan moneter ultra-longgar yang diterapkan oleh BoJ memiliki tujuan yang jelas: mengatasi tantangan ekonomi Jepang yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang rendah dan deflasi berkepanjangan. Namun, kebijakan ini juga telah menimbulkan berbagai isu yang signifikan.

1. Distorasi Pasar

BoJ telah melakukan pembelian besar-besaran terhadap obligasi pemerintah Jepang (JGB) dalam upaya menurunkan imbal hasil dan menjaga suku bunga rendah. Data menunjukkan bahwa BoJ memegang lebih dari 45% dari total JGB yang beredar pada tahun 2023. Hal ini menciptakan beberapa distorsi di pasar obligasi:

- a. **Likuiditas Pasar:** Dengan BoJ menjadi pembeli dominan, likuiditas pasar obligasi menurun. Ini berarti volume perdagangan di pasar obligasi berkurang, yang pada gilirannya membuat harga obligasi tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.
- b. **Volatilitas Harga:** Pengendalian ketat oleh BoJ menyebabkan volatilitas harga obligasi

berkurang secara signifikan, sehingga mengurangi sinyal pasar yang penting bagi investor dalam mengambil keputusan. Selain obligasi, BoJ juga membeli aset lain seperti Exchange-Traded Funds (ETF) dan obligasi korporasi. Intervensi ini menyebabkan harga aset-aset tersebut naik bukan karena fundamental yang kuat, tetapi karena permintaan yang diciptakan oleh BoJ. Beberapa efek dari intervensi ini meliputi:

- i. Overvaluation: Harga saham dan obligasi korporasi mungkin menjadi overvalued (dinilai terlalu tinggi), yang menciptakan risiko bagi investor ketika harga aset akhirnya menyesuaikan kembali ke level yang lebih mencerminkan fundamental ekonomi.
 - ii. Risiko Investasi: Investor mungkin mengabaikan risiko fundamental dan berinvestasi berdasarkan ekspektasi bahwa BoJ akan terus mendukung harga aset, yang bisa berbahaya jika BoJ mengubah kebijakan secara tiba-tiba.
- c. Risiko Sistemik
- Ketergantungan yang tinggi pada kebijakan moneter BoJ dapat menimbulkan risiko sistemik:
- i. Ketidakpastian Kebijakan: Setiap perubahan mendadak dalam kebijakan BoJ dapat menyebabkan volatilitas pasar yang signifikan, mengganggu stabilitas keuangan.
 - ii. Bubble Risiko: Jika harga aset terus naik tanpa didukung oleh fundamental yang kuat, risiko terbentuknya bubble meningkat, yang bisa meledak dan menyebabkan krisis keuangan.

2. Pelemahan Yen

Kebijakan moneter ultra-longgar, termasuk suku bunga negatif dan pembelian aset besar-besaran, telah menyebabkan pelemahan yen terhadap mata uang utama lainnya. Data menunjukkan bahwa nilai tukar yen terhadap dolar AS telah melemah sekitar 20% sejak 2016. Efek dari pelemahan yen meliputi:

- a. Eksportir Diuntungkan: Produk Jepang menjadi lebih murah di pasar internasional, meningkatkan daya saing eksportir Jepang. Misalnya, ekspor mobil dan elektronik

Jepang meningkat sejak yen melemah.

- b. Biaya Impor Naik: Sebaliknya, biaya impor meningkat, yang berdampak pada perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. Harga barang impor yang lebih tinggi juga dapat mempengaruhi konsumen.
- c. Inflasi Impor: Pelemahan yen menyebabkan inflasi impor, di mana harga barang-barang impor meningkat. Ini memiliki beberapa implikasi:
- d. Harga Konsumen: Harga barang-barang konsumsi yang diimpor meningkat, mengurangi daya beli konsumen.
- e. Tekanan Inflasi: Meskipun BoJ menginginkan inflasi yang lebih tinggi, inflasi yang dipicu oleh biaya impor dapat mengganggu ekonomi jika tidak disertai dengan peningkatan upah dan pendapatan.

3. Kritik Publik

Meskipun kebijakan moneter ultra-longgar bertujuan untuk meningkatkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, banyak yang mempertanyakan efektivitasnya. Data menunjukkan bahwa sejak kebijakan ini diterapkan, Jepang belum mencapai target inflasi 2% yang ditetapkan oleh BoJ. Kritik utama meliputi:

- a. Kegagalan Mencapai Target: Meskipun suku bunga rendah dan pembelian aset besar-besaran, inflasi tetap di bawah target. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah kebijakan moneter saja cukup untuk mengatasi masalah deflasi Jepang.
- b. Dampak Terbatas pada Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi tetap lamban, menunjukkan bahwa faktor-faktor lain selain kebijakan moneter mungkin perlu diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat.

Kebijakan BoJ juga mendapat kritik karena dianggap memperburuk ketidaksetaraan ekonomi:

- a. Kenaikan Harga Aset: Kebijakan yang meningkatkan harga aset seperti saham dan real estat lebih menguntungkan mereka yang sudah memiliki aset tersebut, memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin.

- b. Dampak Terbatas pada Upah: Meskipun harga aset naik, upah dan pendapatan rumah tangga biasa tidak mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga manfaat dari kebijakan moneter tidak merata.

Kepercayaan publik terhadap BoJ dapat terpengaruh oleh persepsi bahwa kebijakan moneter tidak efektif:

- a. Transparansi dan Komunikasi: Kurangnya komunikasi yang jelas dan transparan dari BoJ tentang tujuan dan hasil kebijakan mereka dapat mengurangi kepercayaan publik.
- b. Legitimasi BoJ: Kritik dari berbagai pihak, termasuk akademisi, politisi, dan masyarakat umum, dapat mempengaruhi legitimasi BoJ dan kemampuannya untuk menjalankan kebijakan yang efektif.

4. Transisi Kepemimpinan di BoJ

Transisi kepemimpinan di BoJ selalu menjadi momen penting yang dapat membawa perubahan dalam arah kebijakan moneter. Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur BoJ Haruhiko Kuroda pada 2023, ada spekulasi tentang apakah penerusnya akan melanjutkan kebijakan moneter ultra-longgar atau mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif. Kepemimpinan baru membawa harapan akan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi Jepang, tetapi juga menghadirkan ketidakpastian tentang arah kebijakan yang akan diambil.

Kepemimpinan baru menghadapi tantangan dan peluang untuk menyesuaikan kebijakan moneter:

- a. Evaluasi Kebijakan: Ada tekanan untuk mengevaluasi kembali pendekatan terhadap YCC, suku bunga negatif, dan program pembelian aset.
- b. Inovasi Kebijakan: Kepemimpinan baru mungkin perlu mengadopsi langkah-langkah baru dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai target inflasi.

Kebijakan moneter ultra-longgar yang diterapkan oleh BoJ telah membawa sejumlah isu dominan yang mempengaruhi ekonomi Jepang. Distorsi pasar, pelemahan yen, kritik

publik, dan transisi kepemimpinan di BoJ adalah beberapa isu utama yang muncul. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi deflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tantangan yang dihadapi menunjukkan perlunya penyesuaian dan strategi baru untuk mencapai tujuan ekonomi jangka panjang Jepang. Transisi kepemimpinan di BoJ juga menawarkan peluang untuk meninjau kembali kebijakan saat ini dan mengadopsi pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Resepsi atau Tanggapan atas Kebijakan pemerintah Jepang

Kontraksi ekonomi yang terjadi di Jepang telah menimbulkan kekhawatiran tidak hanya diantara masyarakat Jepang tetapi juga komunitas internasional. Keputusan Bank of Japan untuk memperluas rentang YCC menyebabkan penurunan tajam pada indeks Nikkei 225 dan lonjakan imbalan hasil obligasi pemerintah. Yen juga menguat terhadap dolar dan mata uang lainnya, mencerminkan kekhawatiran investor tentang perubahan kebijakan.

Analisis ekonomi melihat keputusan ini sebagai langkah awal menuju normalisasi kebijakan moneter. Ada spekulasi bahwa Bank of Japan mungkin mulai mengurangi ketergantungan pada kebijakan ultra-longgar. Beberapa kritikus juga mempertanyakan efektivitas model state-led development dan menyerukan reformasi yang lebih mendalam. Isu-isu seperti penuaan populasi, utang publik yang tinggi, dan defisit perdagangan kronis semakin memperkuat argumen bahwa pendekatan tradisional mungkin tidak lagi memadai untuk mengatasi tantangan ekonomi modern yang dihadapi Jepang. Respon masyarakat dan pengamat global ini menunjukkan perlunya perubahan yang lebih signifikan dalam kebijakan dan strategi pembangunan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dimasa depan.

Pemerintah Jepang terus mendukung kebijakan moneter yang akomodatif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meskipun ada kritik terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu pemerintah Jepang juga tetap berusaha membuat kebijakan yang dapat menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomiannya.

Pengaruh Kebijakan *State-led Development* Jepang terhadap Dinamika Ekonomi Politik di Kawasan Asia Timur

Kontraksi ekonomi Jepang dapat berdampak signifikan pada dinamika ekonomi-politik di Asia Timur mengingat Jepang adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Timur. Perubahan kebijakan moneter Bank of Japan dapat mempengaruhi aliran modal di kawasan Asia Timur. Dimana investor mungkin akan mengalihkan dana dari atau ke Jepang tergantung pada pergerakan suku bunga dan imbal hasil. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas pasar keuangan di kawasan.

Fluktuasi yen dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang negara-negara Asia Timur lainnya terutama negara yang memiliki hubungan perdagangan erat dengan Jepang. Mata uang yang lebih kuat atau lebih lemah dapat mempengaruhi daya saing ekspor di negara-negara tersebut. Pelemahan Yen juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan resiko resesi di negara-negara tetangga.

Kebijakan BoJ mempengaruhi strategi kebijakan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Timur dalam menghadapi tantangan inflasi dan pertumbuhan. Negara-negara tersebut mungkin perlu menyesuaikan kebijakan mereka untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan daya saing. Sebagai pusat ekonomi di kawasan Asia Timur, masalah ekonomi Jepang dapat mempengaruhi rantai pasokan, perdagangan, dan investasi di seluruh kawasan serta menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas. Kebijakan moneter Jepang dapat memicu respons kebijakan dari negara-negara tetangga seperti Korea Selatan dan China yang juga berusaha untuk menjaga daya saing ekonomi mereka. Misalnya jika Yen menguat maka negara tetangga mungkin perlu menyesuaikan kebijakannya suku bunga mereka sendiri untuk mempertahankan daya saing ekspor dan begitu juga sebaliknya. Hal ini bisa meningkatkan persaingan geopolitik dan ekonomi dengan negara-negara tetangga yang dominan seperti China dan Korea Selatan.

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa dinamika ekonomi Jepang pada periode 2022–2024 tetap sangat dipengaruhi oleh karakteristik fundamental *state-led development* yang

telah membentuk ekonomi Jepang sejak pascaperang. Melalui kebijakan moneter ultra-longgar Bank of Japan, strategi fiskal pemerintah, serta intervensi negara dalam sektor-sektor strategis, Jepang berupaya mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah berbagai tekanan global seperti inflasi energi, pelemahan yen, perlambatan perdagangan, dan ketegangan geopolitik di Asia Timur.

Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan baru, termasuk distorsi pasar aset, risiko sistemik, ketergantungan pada stimulus moneter, dan kritik publik terhadap efektivitas jangka panjangnya. Selain itu, faktor struktural seperti penuaan populasi, tingginya beban utang pemerintah, dan menurunnya daya saing industri menambah kompleksitas pemulihan ekonomi Jepang.

Implikasi regionalnya cukup signifikan: perubahan kebijakan Jepang memengaruhi stabilitas nilai tukar di Asia Timur, arus investasi, pola perdagangan, serta strategi ekonomi negara-negara tetangga yang sensitif terhadap fluktuasi yen. Dengan demikian, meskipun model negara pembangunan masih relevan, Jepang perlu mengadaptasinya dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif agar mampu mempertahankan peran strategisnya dalam ekonomi Asia Timur.

Daftar Pustaka

- Anwar, D. F. (2009). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Isu-isu dan Kepentingan*. Pustaka Pelajar.
- CNBC Indonesia. (2024). *Ekonomi Jepang Babak Belur, PDB Kuartal I-2024 Kontraksi 2%*. Accessed from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240516084838-4-538578/ekonomi-jepang-babak-belur-pdb-kuartal-i-2024-kontraksi-2>
- CNBC Indonesia. (2024). *Kabar Buruk dari Jepang, Ekonomi Minus 2,9%*. Accessed from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240701125115-4-550776/kabar-buruk-dari-jepang-ekonomi-minus-29>
- CNBC Indonesia. (2024). *3 Kabar Buruk Muncul di Jepang, 'Tsunami' sampai Kontraksi*. Accessed from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240702082658-4->

- [550973/3-kabar-buruk-muncul-di-jepang-tsunami-sampai-kontraksi](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221115131200-532-873941/ekonomi-jepang-minus-03-persen-pada-kuartal-iii-2022)
- CNN Indonesia. (2022). *Ekonomi Jepang Minus 0,3 Persen pada Kuartal III 2022*. Accessed from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221115131200-532-873941/ekonomi-jepang-minus-03-persen-pada-kuartal-iii-2022>
- Dwi, C. (2024). *Ekonomi Lesu, Tapi Bursa Jepang Malah Terbang Usai 'Tidur' 34 Tahun*. CNBC Indonesia. Accessed from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240222120238-17-516705/ekonomi-lesu-tapi-bursa-jepang-malah-terbang-usai-tidur-34-tahun>
- Hatch, W., & Yamamura, K. (2012). *Asia in Japan's embrace: Building a regional production alliance*. Cambridge University Press.
- Hausman, J., & Wieland, J. (2014). Abenomics: Preliminary analysis and outlook. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2014(1), pp. 1–76. Accessed from https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/2014a_Hausman.pdf
- Hayami, Akira, Osamu Saitô, and Ronald P Toby (eds), *The Economic History of Japan: 1600–1990* (Oxford, 2004; online edn, Oxford Academic, 31 Oct. 2023), Accessed from <https://doi.org/10.1093/oso/9780198289050.001.0001>
- He, L. (2023). *Japan nominates new central bank leader in possible move away from ultra-easy policy*. CNN. Accessed from <https://edition.cnn.com/2023/02/14/investing/bank-of-japan-new-governor-exit-easy-policy-intl-hnk/index.html>
- Hill, H. (1996). *The Indonesian Economy: Prospects and Challenges*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Hoshi, T., & Kashyap, A. (2004). Japan's financial crisis and economic stagnation. *The Journal of Economic Perspectives*, 18(1), pp. 3–26. Accessed from <https://www.jstor.org/stable/3216873>
- International Monetary Fund. (2023). *Japan: 2023 Article IV Consultation – Staff Report*. International Monetary Fund.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD Economic Survey: Japan 2023*.

- Setiawan, S. R.D. (2024). *Jepang Resesi, Jerman jadi Ekonomi Terbesar Ketiga di Dunia*. Kompas. Accessed from <https://money.kompas.com/read/2024/02/15/135000426/jepang-resesi-jerman-jadi-ekonomi-terbesar-ketiga-di-dunia?page=all>
- Sorongan, T. P. (2023). *RI Lewat, Ekonomi Jepang Meroket 6% pada Kuartal II-2023*. CNBC Indonesia. Accessed from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230815084433-4-462977/ri-lewat-ekonomi-jepang-meroket-6-pada-kuartal-ii-2023>
- Tan, C. and Jie, L. H. (2024). *The Bank of Japan just made a historic rate pivot. Here's what could happen next*. CNBC, Accessed from <https://www.cnbc.com/2024/03/19/boj-bank-of-japan-historic-pivot-interest-rate-hike.html>
- Vogel, E. (1979). *Japan as number one: Lessons for America*. Harvard University Press.
- Wiradi, G. dan Arief, B. (1999). *Menggugat Keberhasilan Ekonomi Orde Baru: Kumpulan Tulisan Gunawan Wiradi*. Pustaka Pelajar.